

**KEMISKINAN DI PEDESAAN : STUDI TERHADAP  
PENGAMALAN AGAMA DAN PERILAKU MENYIMPANG DI  
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR**



**Tesis**

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Humaniora (M.Hum) dalam Program Studi Sejarah Peradaban  
Islam Konsentrasi Islam di Indonesia**

**Oleh :**

**SAIFUL AMRI  
NIM. 040303080**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2007**

## Bab 1

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Agama dan masyarakat secara kesatuan mempunyai jalinan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama merupakan sumber nilai dan norma universal sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku manusia dalam menjawab tantangan kehidupan. Bahkan dikatakan manusia sebagai makhluk sosial belum menjadi manusia sepenuhnya tanpa agama (Nelsen, 1980, hlm. 9). Dalam perspektif al-Qur'an dinyatakan bahwa kualitas kemanusiaan seseorang terletak pada keimanan dan ketakwaan. Manusia takwa adalah manusia yang mampu memimpin dan mengendalikan diri untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan tidak melakukan laranganNya baik berhubungan dengan Allah maupun urusan dunia. Untuk mencapai predikat takwa perlu menyetarakan atau mengintegrasikan dimensi keyakinan (*Tauhid*), dimensi peribadatan (*Syari'ah*) dimensi ahlak (*etika*) dan dimensi keduniaan (*Mu'amalah*) dalam berbagai aspek kehidupan (Suyuthi Pulungan, 1992, hlm. 222).

Dalam konteks yang demikian agama sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia dapat diperankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembangunan bangsa. Karena agama menurut Nurdin (1993, hlm. 400) mengandung beberapa faktor antara lain; faktor kreatif, inovatif, sublimatif, dan integratif<sup>1</sup>. Untuk itu ajaran agama perlu

---

<sup>1</sup> Faktor Kreatif yaitu ajaran agama dapat mendorong manusia dalam melakukan kerja produktif dan kreatif. Kedua, faktor inovatif, yaitu ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketiga, faktor sublimatif yaitu ajaran agama dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia tidak hanya hal keagamaan tetapi juga bersifat keduniaan. Keempat, faktor integratif yaitu ajaran agama dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya baik secara individual maupun kolektif dalam menghadapi tantangan hidup

dipelajari, diyakini dan dihayati secara utuh dan diamalkan dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif, baik dalam masyarakat maupun berbangsa dan negara. Karena menurut Yinger (1980, hlm. 26-27) ajaran agama yang dipelajari, diyakini dan dihayati secara utuh akan menumbuhkan lima dimensi dalam diri manusia beragama yang kemudian membentuk kepribadiannya yaitu dimensi keyakinan, praktek keagamaan, pengamalan, pengetahuan, dan dimensi pengaruh<sup>2</sup>.

Betolak dari pandangan ini agama dapat berperan dalam proses pembangunan karena agama, khususnya agama Islam tidak hanya memuat sistem keyakinan dan sistem peribadatan, tetapi juga mencakup sistem etika dan aspek-aspek sosial atau kehidupan duniawi. Berkaitan dengan peran dan internalisasi ajaran agama ini secara kesatuan sangat ditentukan oleh manusianya. Peningkatan kualitas proses internalisasi dengan pengetahuan, pemahaman secara komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran agama dan penghayatannya baik tentang Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi bagi sistem ajaran agama maupun ajaran agama yang ideal dalam semua segi kehidupan duniawi. Pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan benar akan membentuk perilaku yang religius, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perilaku yang dilarang dalam norma-norma agama.

Dalam konteks yang demikian, Islam menghendaki adanya semangat keserasian dalam kehidupan manusia, sehingga tercipta jalinan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan prinsip keadilan dalam setiap bangsa sehingga tidak tercipta suatu ketimpangan yang menghasilkan penyakit sosial tertentu.

---

<sup>2</sup> Dimensi keyakinan yaitu teologis yang menumbuhkan keyakinan akan kebenaran ajaran agama yang dianutnya. Kedua, dimensi praktek keagamaan, yaitu kesadaran untuk melaksanakan peribadatan (ritual keagamaan) sebagai bukti komitmennya terhadap kebenaran agamanya. Ketiga, dimensi pengamalan yaitu pengamalan pribadi yang bersifat transedental. Keempat, dimensi pengetahuan yaitu manusia beragama harus mengetahui ajaran agamanya dalam berbagai aspeknya. Kelima, dimensi pengaruh yaitu adanya pengaruh keyakinan, peribadatan, pengamalan dan pengetahuan agamanya dalam kehidupan sehari-hari

Islam mengakui kenyataan sosial masyarakat bahwa pada setiap tempat dan waktu terdapat golongan masyarakat yang kaya dan miskin. Hal ini terdapat dalam penjelasan Firman Allah dalam surat An-Nahl “ *Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahayanya agar mereka sama. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah*” (Q.S. An-Nahl [16] : 71). Dengan demikian sudah menjadi kenyataan bahwa dalam setiap masyarakat, bangsa dapat dipastikan terdapat satu atau sejumlah daerah yang bisa di kategorikan daerah tertinggal dan satu atau sejumlah daerah lainnya yang termasuk dalam kategori daerah maju atau makmur. Perbandingan kedua kategori di ataslah yang menghadirkan sosok yang sering di pahami sebagai ketimpangan ataupun kesenjangan antar daerah.

Disamping pola ketimpangan di atas, juga dikenal adanya dua pola ketimpangan lainnya yang lebih dikenal sebagai produk dari perilaku manusia itu sendiri. Pertama, *Developmental Inequalities* yang merupakan buah dari adanya intervensi dalam proses pembangunan. Dan kedua, *Socio-Economic Inequalities* yang berpangkal pada adanya perbedaan perlakuan oleh manusia atas sesamanya (Cornelis Lay, 1993, hlm. 1). Perbedaan perlakuan tersebut bersumber pada sejumlah variasi sebab-akibat. Ia bisa bersumber pada adanya perbedaan-perbedaan dalam hal kelas, jenis kelamin, kebudayaan, agama dan tingkat pendapatan; dan bisa juga di akibatkan oleh adanya perbedaan dalam hal kesempatan dan akses untuk menikmati hasil pembangunan (Sundaram, 1983, hlm. 3).

Menyikapi masalah sosial di atas merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian dan dirubah serta di perbaiki dengan jalan meningkatkan pembangunan masyarakat, sedangkan pembangunan masyarakat itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu usaha atau suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan. Dengan demikian, tidak jarang

berbagai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai masalah sosial seperti kemiskinan, perilaku menyimpang, keterbelakangan yang mendorong dilaksanakannya pembangunan masyarakat. Dengan perkataan lain, pembangunan masyarakat dapat berfungsi sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah sosial tersebut. Bahkan melalui pembangunan masyarakat diharapkan dapat menangani masalah langsung pada sumbernya, bukan hanya sekedar gejalanya saja.

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia bukan sebuah pengecualian. Keterbelakangan daerah-daerah dan ketimpangan antar daerah merupakan masalah sosial yang telah, sedang dan tampaknya akan terus bertahan sebagai salah satu persoalan besar di negeri ini. Dengan demikian, arus perkembangan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia belumlah merata. Ada yang masyarakatnya berkehidupan makmur dan ada pula masyarakat yang miskin.

Memang memahami masalah kemiskinan menuntut adanya pemikiran yang kompherensif. Seringkali kemiskinan hanya di identikkan dengan kemiskinan material saja, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan fisik lainnya. Tapi kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi kemiskinan juga terkait erat dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan hanya dapat dipahami secara utuh apabila dimensi-dimensi lain dari kehidupan manusia juga diperhitungkan, Sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan memerlukan tindakan yang multidimensi dan kompherensif.

Menurut Soetomo (1995, hlm. 120) memahami masalah kemiskinan maka harus dilihat dari intensitas dan karakteristik masalahnya, serta sampai berapa jauh masalah

tersebut membawa pengaruh pada berbagai segmen kehidupan masyarakat. Pada umumnya banyak pendapat mengatakan bahwa kondisi kemiskinan tersebut telah mempengaruhi secara negatif berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak jarang menciptakan suatu kondisi yang tidak kondusif malah meresahkan masyarakat lainnya. Seperti terjadinya perilaku menyimpang dari norma agama maupun norma formal. Kondisi tersebut menurut Soetomo sebagai lingkaran yang tak berujung pangkal.

Sementara itu Sartono Kartodirdjo (1987, hlm. 75) menempatkan dua jenis syndrome tentang masyarakat miskin yaitu syndrome kemiskinan dan syndrome inertia. Menurutnya di daerah pedesaan Indonesia syndrome kemiskinan berkaitan dengan berbagai dimensi yang saling memperkuat seperti produktivitas rendah, pengangguran, kurang gizi, buta huruf dan sebagainya. Sedangkan syndrome inertia berakar pada passivisme, fatalisme, patologis, dan ketergantungan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masalah kemiskinan seringkali mudah mengarah pada terjadinya komplikasi yang membuat lebih sulit untuk melakukan penanganan secara tuntas, paling tidak kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya penanganan secara menyeluruh.

Sedangkan Chamber (1987, hlm. 145) mengemukakan dimensi yang lebih luas berkaitan dengan masalah kemiskinan di daerah pedesaan. Berbagai dimensi tersebut juga dikatakan saling berkaitan satu sama lain dalam posisi memperkuat kondisi kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu Chamber menamakannya dengan perangkat kemiskinan. Agaknya pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan lingkaran kemiskinan dan syndrome kemiskinan yang telah dikemukakan oleh pendapat-pendapat tersebut di atas.

Berbagai pendapat yang telah dikemukakan tersebut memang lebih banyak pada realita kemiskinan di daerah pedesaan, walaupun demikian kecenderungan tadi sebetulnya juga berlaku pada kondisi kemiskinan pada umumnya. Eitzen (1986, hlm. 165) berpendapat

bahwa lapisan miskin pada umumnya cenderung terisolir dari lapisan masyarakat lain. Dalam pandangan masyarakat lain, kaum miskin cenderung malas, kotor dan berbuat yang negatif lainnya.

Dengan demikian, menjadi miskin dirasakan telah mengalami degradasi moral dan pada umumnya masyarakat miskin cenderung minder dalam lingkungan masyarakatnya, seolah-oleh mereka terbuang dalam lingkungannya sendiri. Bila hal itu terjadi maka masyarakat yang miskin dapat bersikap apatis dan membawa pengaruh bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain bahkan tidak mungkin akan membawa dampak pada keturunannya.

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Saparinah Sadli (1986, hlm. 128) menurutnya bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga miskin sebagaimana keluarga pada umumnya merupakan lingkaran sosial yang sangat penting dimana anak-anaknya belajar dalam memantapkan berbagai norma sosial yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, kondisi keluarga miskin sebagai lingkungan sosial kurang mendukung atau kurang membantu terbentuknya watak atau sifat-sifat pribadi yang dapat mendobrak kemiskinan itu sendiri.

Oleh karena itu, situasi kemiskinan yang terlalu lama mencekam suatu kelompok dapat membentuk budaya kemiskinan sebagai suatu sub budaya yang kemudian membentuk nilai-nilai khas yang erat hubungannya dengan masalah kemiskinan. Menurut Astrid Susanto (1984, hlm. 113) bahwa budaya kemiskinan dapat tersosialisasikan kepada generasi berikutnya melalui proses keluarga. Dengan kata lain bahwa kemiskinan tersebut diturunkan secara turun-temurun melalui proses keluarga.

Sebenarnya masalah kemiskinan di Indonesia bukan lagi terjadi pada masa sekarang ini. Tetapi pada abad-abad sebelumnya yaitu masa kolonialisme Belanda yang dimulai dengan adanya sistem tanam paksa menyebabkan kemelaratan dan kesengsaraan penduduk,

bukan saja dalam segi harta benda melainkan juga nyawa. Kondisi tersebut ditambah lagi pada masa pendudukan Jepang yang menerapkan kerja romusha yang semakin menambah penderitaan bagi penduduk Indonesia. Sehingga kemiskinan yang berjalan dalam ruang dan waktu yang panjang tersebut memastikan bahwa masalah sosial tersebut sudah mengakar pada masyarakat Indonesia. Masalah sosial tersebut menurut Oscar Lewis (1996, hlm. 151) di pandang sebagai suatu kemiskinan yang membudaya.

Dalam konteks yang demikian, maka kemiskinan dapat dipahami sebagai masalah sosial dari dulu hingga sekarang ini. Barangkali beranjak dari sinilah, kalau dunia Internasional menaruh perhatian kepada pencapaian kesejahteraan manusia (*Human Welfare*). Demikian juga dengan halnya konferensi Internasional di Stochom tahun 1972 yang memfokuskan pembahasannya pada lingkungan hidup sedunia (Prisma 1, 1974, hlm. 15-23).

Langkah-langkah tersebut intinya mencoba untuk menemukan kelestarian hidup yang ideal. Demikian juga dengan yang terjadi di Indonesia yang mengarahkan pembangunan pada kelestarian hidup yang ideal guna tercipta pembangunan manusia seutuhnya dan merata (Adi Sasono, 1996, hlm. 89). Kesejahteraan ideal pada ide internasional dan manusia seutuhnya pada ide nasional, sangat sukar dicapai tanpa peran pembangunan yang merata yang mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Menilik kondisi strata kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan pokok (ekonomi), memang memungkinkan akan munculnya perilaku yang menyimpang, terutama bagi yang tidak siap menghadapi arus perkembangan modernisasi seperti sekarang ini. Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak

masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan sifatnya tertutup, sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Hal-hal seperti di atas terjadi kemungkinan karena adanya faktor-faktor sosial yang ditimbulkan dari perkembangan zaman, sehingga menambah sederetan golongan kaum miskin di Indonesia. Di sisi lain, perkembangan zaman modern sekarang ini yang memungkinkan banyak bertemu berbagai macam budaya sebagai hasil dari makin akrabnya komunikasi daerah, nasional dan internasional. Amalgamasi atau keluluhan bermacam-macam budaya itu dapat berlangsung lancar dan lambat, akan tetapi tidak jarang berproses melalui konflik personal dan sosial yang hebat. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial serta ketidakrukunan kelompok-kelompok sosial. Sebagai akibat lanjut timbul ketidak sinambungan, disharmonisasi, ketegangan, kecemasan, ketakutan, kerusuhan sosial dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum ataupun norma agama.

Situasi sosial yang demikian itu mengkondisikan timbulnya banyak perilaku patologis sosial atau sosiopatik yang menyimpang dari pola-pola umum, sebab masing-masing orang hanya mentaati norma dan peraturan yang dibuat sendiri, mereka bertingkah laku semaunya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka merampas hak-hak orang lain. Akibatnya muncullah banyak masalah sosial yang disebut pula sebagai tingkah laku sosiopatik, deviasi sosial, patologis sosial dan sebagainya yang

lambat laun apabila tingkah laku menyimpang tersebut meluas di tengah masyarakat maka berlangsunglah deviasi situasional kumulatif yang memunculkan berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat dan melanggar norma-norma hukum formal ataupun norma agama. Kondisi semacam ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin karena mereka akan mengalami suatu depresi atau tekanan batin, sehingga kemungkinan besar melakukan tindakan-tindakan di luar aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Seperti ungkapan berikut :

Hidup di bawah garis kemiskinan bukan lagi senin dan kamis, tetapi dicari pagi belum tentu dapat sore. Faktor ini perlu menjadi perhatian untuk di telaah dan sebab terjadinya perubahan nilai sosial. Sekedar untuk meresapkan, mungkin ada baiknya diketengahkan Hadits Nabi “ *Kemiskinan itu mendekatkan orang kepada kekufuran*”. Kufur diartikan melanggar hukum yang berarti tidak disiplin lagi. Jadi faktor penentu disiplin atau tidaknya seseorang lebih luas lagi masyarakat sangat bergantung dari standar kehidupan dalam masyarakat (Bismar Siregar, Vol 1, hlm. 34).

Pendapat Bismar tersebut pada dasarnya mengambil dari pernyataan hadits Nabi dan pernyataan Khalifah Ali Bin Abi Thalib “ *Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya* (Rahmat, 1999, hlm. 21). Ungkapan tersebut merupakan gagasan yang mengantisipasi bahwa kemiskinan menjadi penyebab dan akibat dari timbulnya faktor-faktor negatif lain. Hadits Nabi tersebut merupakan peringatan bahwa kemiskinan yang berakibat pada timbulnya proses akumulasi faktor-faktor negatif yang harus diatasi dan dikendalikan. Bila tidak akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk timbulnya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

Melihat dan menyikapi hadits tersebut, Kecamatan Pemulutan Selatan mempunyai potensi yang sangat besar timbulnya perilaku menyimpang, hal ini adanya indikasi bahwa Kecamatan Pemulutan Selatan merupakan Kecamatan yang paling miskin se Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan perilaku menyimpang pada dasarnya adalah segala tindakan yang melanggar norma-norma agama ataupun norma formal dalam kehidupan (Abdulsyani,

1987, hlm. 27). Sehingga jika dikatakan menyimpang berarti ada aturan baku yang harus di taati yaitu norma-norma tersebut.

Dengan demikian kemiskinan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat terhadap hukum ataupun norma-norma agama. Citra dan kenyataan kemiskinan sebagai bentuk kelumpuhan ekonomi akan menumbuhkan keraguan dikalangan umat Islam sendiri tentang Islam datang membawa rahmat untuk seluruh umat manusia. Karena itu kemiskinan sangat besar pengaruhnya, bukan saja dalam segi ekonomi melainkan juga dalam segi yang lainnya dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan beragama.

### **Batasan Masalah**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah mengenai kemiskinan dan pengamalan agama serta hubungannya dengan terjadinya perilaku menyimpang. Berkaitan dengan judul tersebut peneliti membatasi permasalahannya yaitu :

1. Tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pengamalan agama masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Perilaku Menyimpang yang terjadi di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diungkapkan di atas, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana pengamalan agama masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir?

3. Bagaimana Bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pengamalan agama masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir.

### **Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan bidang keilmuan yang diteliti. Selain itu untuk menguji apakah kemiskinan dan pengamalan agama dapat dijadikan setidaknya sebagai analisis mikro dalam penyebab perilaku menyimpang di tengah kehidupan masyarakat. Juga diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai data baru bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan menyikapi permasalahan yang timbul dari kemiskinan tersebut.

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi akademis, yakni dalam rangka pembangunan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu sosial, selain itu memberikan kontribusi dalam menentukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

## **Kajian Pustaka**

Masalah agama dan kemiskinan pernah ditulis oleh A.M Saefudin (1992) dalam makalahnya *Peran Agama dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, kemelaratan dan ketergantungan*. Saefudin menjelaskan bahwa agama mempunyai hubungan yang erat dengan pemberantasan kemiskinan “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karuniah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Al-Mulk: 17). Dengan demikian bahwa agama telah memberikan petunjuk untuk bekerja keras bagi kaum muslim supaya terhindar dari kemiskinan.

Parsudi Suparlan (1974) dalam bukunya yang berjudul “*The Javanese in Surinam : Ethnicity in An Ethnicity Plural Society*”. Dalam penelitian itu Suparlan menegaskan bahwa adanya hubungan fungsi agama dalam menciptakan anti kemiskinan. Parsudi Suparlan menyetujui Hadits “Orang-orang muslim itu harus bekerja keras seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, dan bersembahyang sebanyak-banyaknya seolah-olah dia akan mati besok pagi. Dengan demikian hadits tersebut menjadi pendorong bagi umat Islam untuk berusaha memerangi kemiskinan dan meningkatkan derajat dan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy (1996) dalam bukunya *Konsepsi Islam dalam mengentaskan kemiskinan*. Qardawi menjelaskan bahwa Islam menentang golongan-golongan yang mensucikan kemiskinan. Menurutnya hadits-hadits Rasulullah yang memuji terhadap sikap zuhud dalam menempuh hidup duniawi ini sama sekali tidak menyinggung tentang terpujinya kemiskinan. Ia juga menjelaskan tentang bahaya atau dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan antara lain : mempengaruhi akidah,

etika dan moral, rumah tangga, masyarakat dan ketentramannya serta memengaruhi pikiran manusia itu sendiri.

Sedangkan penelitian mengenai kemiskinan dampaknya terhadap perilaku menyimpang dikemukakan oleh diantaranya adalah Hardiman (1982) dalam bukunya yang berjudul : *The Social Dimension of Development*". Hardiman menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kemacetan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultur yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Dalam analisisnya ia menyinggung mengenai faktor-faktor yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut diantaranya memunculkan tindakan yang melanggar norma-norma hukum formal maupun norma agama. Menurutnya hal tersebut terjadi karena struktur gagal dalam mewujudkan kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan sebagainya.

Selanjutnya Oscar Lewis (1959) sebagai konseptor kemiskinan dalam "*The Culture Of Poverty*". Dalam studi kasus tersebut Oscar Lewis menjelaskan mengenai hubungan kemiskinan dengan kebudayaan kemiskinan. Menurutnya kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Sedangkan kebudayaan kemiskinan menurut Lewis akan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti : (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) Tingginya pengangguran (3) Rendahnya upah buruh, (4) Tidak berhasilnya golongan yang berpenghasilan rendah

meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah, (5) Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, (6) Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Sedangkan Mubyarto (1959) dalam bukunya yang berjudul “ *Kemiskinan di Pedesaan*”. Mubyarto menganalisis penyebab kemiskinan tersebut, menurutnya kemiskinan terjadi karena adanya faktor alamiah, menurutnya kemiskinan di akibatkan oleh sumber daya yang terbatas, sehingga kemiskinan tersebut timbul dengan sendirinya. Sedangkan faktor kedua adalah terjadi karena struktur, yaitu kemiskinan tersebut terjadi karena adanya kesalah dari sturuktur. Artinya masyarakat dibuat miskin oleh struktur tersebut.

Sedangkan Cornelis Lay (1993) dalam bukunya “*Ketimpangan dan Keterbelakangan di Indonesia*” menjelaskan bahwa pembangunan pada masa sekarang lebih menekankan pembangunan di perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang miskin pembangunan tersebut tidak membawa perubahan yang berarti terhadap nasib mereka.

Sedangkan penelitian mengenai Patologis Sosial dikemukakan oleh Kartini Kartono dalam bukunya “*Patologis sosial*”. Ia menguraikan mengenai adanya hubungan masalah sosial dan patologis sosial. Masalah sosial tersebut diantaranya adalah pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan dan sebagainya yang mempunyai dampak terhadap timbulnya perilaku-perilaku yang menyimpang. Ia mencontohkan dari masalah sosial tersebut akan memunculkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang mengarah pada suatu kondisi kumulatif berupa tindakan kriminal.

Selanjutnya Simandjuntak (1975) dalam bukunya "*Masalah Sosial di Indonesia*". Ia menguraikan bahwa pada dasarnya patologis sosial terbentuk akibat dari masalah sosial itu sendiri, misalnya pengangguran yang belum teratasi maka lama-kelamaan akan menimbulkan degradasi moral dan selanjutnya akan menciptakan perilaku-perilaku yang melanggar norma sosial itu sendiri.

Pemikiran Kartini-Kartono dan Simandjuntak tersebut sejalan dengan pemikiran Soetomo (1995) dalam bukunya "*Masalah Sosial dan Pembangunan*". Soetomo melihat bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia telah menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat, ketimpangan tersebut telah membuka celah terjadinya konflik dan menciptakan suatu kondisi yang tidak kondusif dengan munculnya tindakan-tindakan yang melanggar dari aturan atau hukum formal. Dengan demikian hal semacam ini menghambat dari pembangunan.

### **Kerangka Teoritis**

Teori mengenai kemiskinan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun definisi tersebut kadangkala berbeda satu sama lainnya dikarenakan para ahli melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Sar. A. Levitan (1980, hlm. 2) kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Bradley R. Schelter (1979, hlm. 214) kemiskinan adalah ketidak sanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.

Selanjutnya Ajit dan Griffin (1980, hlm. 54) mengatakan bahwa kemiskinan berarti kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan pakaian dan perumahan yang tidak memadai serta

tingkat pendidikan yang rendah ditambah dengan tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer dan lain sebagainya.

Sedangkan Mubyarto (1993, hlm. 112) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan manusia yang tertekan oleh serba kekurangan, terutama di bidang materi atau jasmaniah. Pendapat tersebut hampir sama dengan pendapat Cohen dalam Mulyanto (1975, hlm. 20) yang mendefinisikan masyarakat miskin sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak menentu. Selanjutnya Mulyanto menguraikan ciri-ciri dari masyarakat miskin terbut antara lain :

1. Kekuarangan gizi, makanan jauh dibawah normal tapi bukannya kurang makan
2. Hidup morat marit
3. Kondisi kesehatan yang menyedihkan
4. Pakaian selalu kumal dan tidak teratur
5. Tempat tinggal yang jauh dari memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan
6. Keadaan anak-anak yang tidak terurus dibiarkan bergelandangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.
7. Tidak mampu mendapatkan pendidikan formal dan non formal (Mulyanto, 1995, hlm. 20).

Dengan demikian, kemiskinan dalam arti luas tidak terbatas pada kurang mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan minimumnya atau secara ekonomi. Tapi walaupun demikian, manifestasi kemiskinan yang paling mendasar adalah kemiskinan dari segi ekonomi, sebab kalau dari segi ekonomi saja sudah miskin maka bisa diduga bahwa individu tersebut juga miskin dari segi yang lain. Oleh sebab itu menurut Agus Sutanto (1993, hlm. 30) kemiskinan ekonomi adalah yang pertama kali haru di atasi.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupan. (BPS, 2006). Selanjutnya BPS menguraikan mengenai kategori kemiskinan yaitu : penduduk sangat miskin, penduduk miskin dan penduduk mendekati kemiskinan.

1. Penduduk sangat miskin adalah apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 120.000 per orang per bulan.
2. Penduduk miskin adalah apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 sampai 2100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara dengan Rp. 150.000 per orang per bulan.
3. Penduduk mendekati kemiskinan adalah apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 sampai 2300 kalori plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara Rp. 175.000 per orang per bulan.

Dengan demikian maka teori yang dikemukakan oleh BPS tersebut berorientasi pada kebutuhan pokok manusia, artinya dalam teori tersebut lebih mementing aspek ekonominya. Hal ini sangat berbeda dalam teori Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang membagi tahapan-tahapan keluarga sejahtera serta yaitu :

1. Keluarga Pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*Basic Need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (*Basic Need*) tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (BKKBN, 2006).

Sedangkan indikator yang digunakan dalam teori BKKBN tersebut adalah ;

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dalam berpergian.
4. Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
5. Bila anak atau anggota keluarga lainnya sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Emile Durkheim yang menyatakan bahwa Bilamana kebutuhan tidak dapat dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat patologis (Emile Durkheim, dalam Robert Merton, 1987, hlm. 25). Merton mencontohkan bahwa dalam masyarakat sekarang ini fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, bilamana kehidupan ekonomi mengalami fluktuasi, maka bagian ini akan mempengaruhi bagian lain dari sistem itu dan akhirnya sistem sebagai keseluruhan. Disamping itu agama mempunyai peranan dalam pemberdayaan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan. Agama memberdayakan manusia berawal dari proses pemaknaan hidup yang mengacu kepada aspek kognitif dan evaluatif. Dalam aspek kognitif, agama menyediakan suatu sistem interpretasi mengenai kenyataan. Pada aspek evaluatif, sistem interpretasi diubah menjadi sistem nilai dan moral (Sastraprteja, 1995, hlm. 41). Sehingga agama dapat menjadikan manusia mampu memberikan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, dan memberdayakan umatnya (masyarakat) melalui harapan akan kehidupan yang lebih baik pada masa depan

Dengan demikian, agama memiliki suatu tanggung jawab sosial begitu besar dan mensejahterakan umat-Nya dalam hal berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial-budaya, ekonomi dan politik. Dengan kata lain, agama (dengan nilai-nilainya) memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam memberdayakan masyarakat agar menjadi insan yang lebih

bermartabat. Untuk menjadi insan yang bermartabat tersebut, pengamalan agama mutlak diperlukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma baik norma agama maupun norma secara formal.

Moelim Abdurrahman (1995, hlm. 198) menulis bahwa agama tanpa memiliki suatu tanggung jawab sosial sama artinya dengan pemujaan semata, demikian juga hidup ini tanpa kearifan Tuhan, mungkin tidak perlu orang beragama. Karena, hanya dengan suatu tanggung jawab sosial, agama akan terintegrasi dengan realitas kompleksitas sosial, dan kesalehan individu. Karena dengannya seseorang akan mendapatkan basis ketaqwaan dalam bentuk soliodaritas kemanusiaan yang jelas.

Burhanuddin Daya (1993, hlm. 52) mengatakan bahwa agama merupakan kesempurnaan eksistensi manusia, sumber vitalistas yang mewujudkan perubahan dunia dan melestarikannya. Kualitas suatu perubahan ditentukan oleh kualitas agama yang menjadi sarannya. Untuk mewujudkan kesempurnaan dan kualitas agama kearah yang lebih baik, di sisi lain sangat ditentukan oleh pembangunan di sektor agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peningkatan kehidupan agama manusia yang bersifat alami kearah kehidupan yang didasarkan atas nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama memerlukan suatu konfigurasi dan transformasi yang diawali oleh transformasi kehidupan beragama masyarakat setempat.

Mubyarto, dalam Sujangi (1993, hlm. 112) mengatakan bahwa semua agama percaya bahwa apabila setiap umat menjalankan perintah-perintah agama dan tidak melanggar larangan-larangannya, maka seluruh masyarakat akan mencapai kedamaian, dengan penuh kerukunan, kesejahteraan dan keadilan.

Menyimak pendapat tersebut khususnya mengenai kesejahteraan dan keadilan, di dalam masyarakat terdapat perbedaan yang mencolok dimana banyaknya masyarakat yang

tidak memperoleh kesejahteraan dalam kata lain masyarakat tersebut miskin, ataupun tidak memperoleh keadilan. Hal ini terdapat dalam penjelasan Firman Allah dalam surat An-Nahl ([16] : 71) “ *Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahayanya agar mereka sama. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah*”. Dengan demikian sudah menjadi kenyataan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan, ada yang masyarakatnya kaya dan ada juga yang miskin.

Mengenai kemiskinan tersebut, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, menjelaskan bahwa bahaya atau dampak-damapak yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut antara lain dapat mempengaruhi akidah, etika dan moral, rumah tangga, masyarakat dan ketentramannya serta mempengaruhi pikiran manusia itu sendiri. (Yusuf Al-Qardawy, 1996, hlm. 12)

Berkaitan dengan hal tersebut Kuntowijoyo menjelaskan bahwa perlunya memberikan pengetahuan dan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dengan dunia empiris, karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, agama tidak boleh sekedar pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, melainkan harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut (Kuntowijoyo, 1993, hlm. 72).

Dalam konteks ini Kuntowijoyo menawarkan perlunya reinteroretasi terhadap ajaran dasar Islam. *Pertama*, penafsiran sosial terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam al-Qur’an. *Kedua*, mengubah cara berfikir subyektif ke cara berfikir objektif dalam memahami ajaran agama sehingga ia dapat disuguhkan dalam cita-cita objektif. *Ketiga*, menerjemahkan ajaran Islam normative menjadi teoritis. *Keempat*, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.

Dengan demikian bahwa pemahaman keagamaan harus dibawa pada dataran realitas kekinian yang empiris. Pemahaman refleksi normatif kepada refleksi aktual dan empiris sehingga dengan pemahaman semacam ini para penganut agama dapat menyikapi kenyataan-kenyataan empiris menurut perspektif ketuhanan.

Thomas F. Odea (1990, hlm. i) mengatakan bahwa kualitas pengamalan agama sangat ditentukan oleh kualitas pengetahuan agama yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya akan semakin baik kualitas pengamalan agamanya, dan demikian juga sebaliknya, semakin rendah pengetahuan agamanya akan semakin rendah pula pengamalan dan kesadaran terhadap agamanya. Indikasi ini sangat tergantung kepada sarana dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur formal maupun informal.

Dengan demikian pengalaman terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan benar akan membentuk perilaku yang religius, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perilaku yang dilarang dalam norma-norma agama. Pelanggaran norma agama ataupun adanya tindakan kriminal bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri melainkan adanya faktor-faktor yang melatar belakanginya, salah satu faktor tersebut adalah adanya kemiskinan.

Mengenai kemiskinan tersebut, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, menjelaskan bahwa bahaya atau dampak-damapak yang ditimbulkan akibat kemiskinan tersebut antara lain dapat mempengaruhi akidah, etika dan moral, rumah tangga, masyarakat dan ketentramannya serta mempengaruhi pikiran manusia itu sendiri. (Yusuf Al-Qardawy, 1996, hlm. 12).

Apa yang diungkapkan oleh Qardawy tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan dapat merusak seluruh tatanan kehidupan, termasuk timbulnya perilaku menyimpang.

Prilaku menyimpang jika ditinjau dari sudut psikologis berarti suatu prilaku yang abnormal yang menyangkut masalah kejiwaan atau psikisnya. Prilaku semacam ini diantaranya adalah homo seksual, gila dan sebagainya (Kartini Kartono, 2001, hlm. 1). Namun jika ditinjau dari sudut sosiologi maka perilaku menyimpang berarti semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, moral, disiplin serta hukum formal (Priherjanto, 1991, hlm. 17). Sedangkan menurut Abdulsyani perilaku menyimpang pada dasarnya adalah segala tindakan yang melanggar norma-norma agama ataupun norma formal dalam kehidupan (Abdulsyani, 1987, hlm. 27). Dikatakan menyimpang berarti ada aturan baku yang harus di taati yaitu norma-norma tersebut.

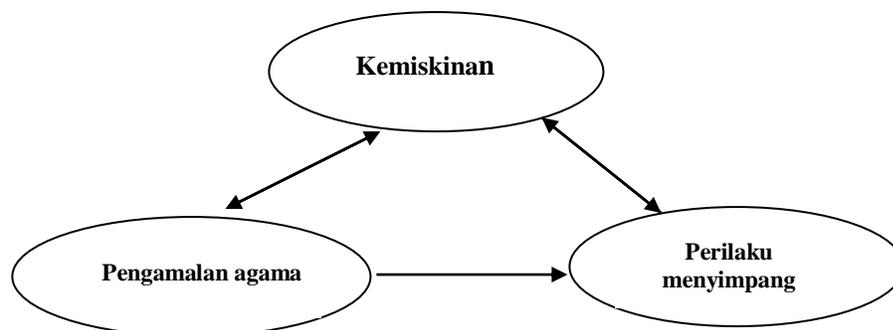
Simandjuntak menjelaskan prilaku menyimpang sebagai suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok ataupun masyarakat (Simandjuntak, 1975, hlm. 12). Reinhardt mengemukakan ciri dari perilaku menyimpang diantaranya adalah ; terjadi di dalam masyarakat, membawa akibat terhadap masyarakat serta menjadi tanggung jawab masyarakat (Reinhardt, 1971, hlm. 23). Dengan demikian maka dapat disimpulkan perilaku menyimpang timbul dari problem sosial khususnya perkembangan kondisi sosial yang belum teratasi, sehingga menimbulkan faktor negatif dan membawa dampak bagi masyarakat.

Selanjutnya Soetomo (1995) mengemukakan model pendekatan atau teori mengenai masalah sosial. Diantara teori tersebut adalah teori fungsional struktural dalam perspektif patologis sosial dan prilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang Soetomo melihat bahwa masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai macam aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan

tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

### **Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu kemiskinan, pengamalan agama dan perilaku menyimpang. Dari ketiga variabel tersebut maka kemiskinan merupakan variabel utama atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan pengamalan agama dan perilaku menyimpang adalah variabel yang dipengaruhi. Maksud dari variabel-variabel tersebut adalah kemiskinan merupakan variabel yang mempengaruhi yang menyebabkan pengamalan agama masyarakat menjadi kurang sempurna, sedangkan dari kemiskinan dan pengamalan agama dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesesuaian antara kebutuhan dengan pendapatan sehingga mengganggu perekonomian. Sedangkan agama yang dimaksud disini adalah mengenai pengamalan agamanya, bukan dalam segi teologi ataupun agama dalam arti tekstual. Maksud pengamalan agama disini adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang miskin. Agama disini dilihat dari kajian ilmu sosial yaitu sebagai aktivitas sosial dalam beragama. Sedangkan perilaku menyimpang adalah segala tindakan yang melanggar norma-norma agama ataupun norma formal dalam kehidupan. Skema alur berpikir sebagai berikut :



## **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti merupakan instrumen utama dalam kegiatan penelitian, dan seorang peneliti kualitatif tersebut berupaya mendeskripsikan dan memahami masyarakat sebagaimana masyarakat itu sendiri mempersepsikan diri mereka. Oleh karena itu masyarakat yang menjadi sasaran lebih dipandang sebagai subjek yang mempunyai pendapat, sikap tentang diri mereka sendiri (Moleong, 1999, hlm. 4-5). Menurut penulis metode tersebut lebih banyak kemungkinan bagi pemakainya untuk mengembangkan diri, terutama sewaktu melakukan penelitian di lapangan. Peneliti juga diberi keleluasaan di lapangan untuk mencari atau menemukan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan untuk dapat memahami kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat hubungan kehidupan beragama masyarakat serta untuk melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan antropologis dimaksudkan untuk melihat budaya-budaya dalam masyarakat, termasuk kemiskinan. Apakah kemiskinan tersebut telah membudaya dalam masyarakat. Karena itu dilakukan pengamatan langsung terhadap wujud ataupun kegiatan berkembang dalam masyarakat.

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara dan angket dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari responden. Sedangkan data sekunder dimaksudkan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari lapangan berupa monografi. Data ini dikumpulkan dari sejumlah informan penting, ataupun publikasi pemerintah.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, angket dan observasi. Wawancara dilakukan dengan mendalam dengan semi atau tidak terstruktur. Responden di pilih secara sengaja (*Purposive*) yaitu orang-orang yang hidupnya miskin, dan pelaku tindakan menyimpang. Selain itu peneliti mengambil data-data juga dari kantor kepolisian untuk mencari modus operandi tindakan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Selain itu observasi digunakan dalam mengumpulkan data tentang kehidupan sosial ekonomi dan sosial keagamaan. Pengamatan dilakukan dalam kaitan dengan pelaksanaan aktivitas keagamaan yang dilakukan para responden.

Teknik analisis data yang digunakan dengan menghimpun data primer dan skunder kemudian diedit yakni dilakukan penyusunan kata-kata hasil wawancara berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan kategori tersebut dicari makna dan memberikan tafsiran yang inovatif yakni mengembangkan ide-ide dengan argumen yang didasarkan pada data yang ditemukan selain itu digunakan juga teori-teori sebagai kerangka acuan.

Dalam penelitian kualitatif, maka analisis yang lazim digunakan adalah model analisis interaktif. Dalam penerapannya, model analisis ini melibatkan tiga komponen yang saling terkait dan menentukan hasil akhirnya, yaitu : (1) Reduksi Data. Reduksi data merupakan kegiatan penyederhanaan data, perampingan data, yang akan memudahkan peneliti dalam proses pencarian makna. Reduksi data dilaksanakan secara berulang-ulang sesuai dengan tingkat kebutuhan untuk dan jenis data yang perlu direduksi. Dalam kegiatan ini, data-data yang tidak berguna akan dihilangkan, sehingga yang diambil hanya data untuk keperluan analisis. (2) Sajian data. Sajian data merupakan kegiatan pengumpulan data atau perolehan informasi yang tersusun secara sistematis, kronologis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. (3) Verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penarikan

kesimpulan atau hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang sudah diajukan (Sutopo, 2002, hlm. 187). Hasil analisis inilah yang kemudian dilaporkan dalam laporan penelitian.

## **Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab. Setiap bab merupakan kaitan hubungan dengan bab-bab lainnya sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Secara garis besarnya laporan atau hasil penelitian ini terdiri atau bagaian-bagian yang secara sistematis tersusun seperti uraian berikut.

Bab 1 sebagai bab pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori dan metodologi penelitian. Bab ini dimaksudkan sebagai penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi alasan penelitian, serta rumusan dan batasan masalah yang diteliti, tujuan yang akan dicapai, juga memuat kajian pustaka dan landasan teori yang relevan dengan penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 memuat kajian-kajian teroris yang digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam melakukan penelitian yaitu terdiri dari ; pengertian kemiskinan, yang memuat teori-teori tentang kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan dan pandangan Islam terhadap kemiskinan. Sedangkan sub bab selanjutnya yaitu mengenai pengertian perilaku menyimpang, yaitu memuat teori-teori dari perilaku menyimpang, faktor-faktor timbulnya perilaku menyimpang.

Bab 3 memuat tentang demografi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; keadaan alam, keadaan penduduk, tingkat pendidikan, keadaan mata pencaharian dan ekonomi pedesaan dan terakhir adalah mengenai kehidupan sosial dan agama. Bab ini menggambarkan keadaan wilayah Pemulutan Selatan secara keseluruhan.

Bab 4 memuat tentang pokok penelitian yaitu tahapan-tahapan dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan yaitu menjelaskan strata ekonomi masyarakat, Pengetahuan dan pemahaman agama masyarakat, bentuk-bentuk perilaku menyimpang

yang terjadi di Kecamatan Pemulutan Selatan, dan faktor-faktor yang dominan penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

Bab 5 sebagai bagian akhir atau bab penutup dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan gambaran dari hasil penelitian. Selain itu dikemukakan juga saran-saran yang dinilai ada hubungannya dengan pengambilan kebijakan pembangunan di wilayah Ogan Ilir Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Pemulutan Selatan.

Di bagian akhir laporan disertakan pula daftar kepustakaan serta lampiran-lampiran yang berkaitan.

## Bab 2

### KERANGKA TEORI

#### Kemiskinan

##### 1. Pengertian Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991, hlm. 660) kata “miskin” diartikan sebagai “tidak berharta benda; serba kurang”, dan arti kata kemiskinan adalah miskin; keadaan miskin. Jadi secara bahasa pengertian kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketiadaan harta benda atau suatu keadaan yang menggambarkan serba kekuarangan. Sedangkan dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedangkan faqir diambil dari kata *faqr* yang pada mulanya tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat, sehingga mematahkan tulang punggungnya (Quraish Shihab, 1996. hlm. 449).

Dalam pandangan ulama fiqh, seperti pendapat Imam Syafi’i (1981. III, hlm. 3) dinyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan ketentuan ini berlaku bagi orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili (2000, hlm. 281) yang menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat hidupnya, namun tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Selanjutnya Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud “cukup” disini adalah dapat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bila diperhatikan kedua pendapat tersebut, maka terlihat inti permasalahan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan hidup

seseorang atau keluarga, namun tampaknya yang dimaksud kebutuhan hidup disini adalah kebutuhan yang hanya terbatas pada sandang, pangan, papan, yang layak saja artinya kebutuhan dalam hal konsumsi.

Definisi yang dikemukakan kedua ulama tersebut tampak belum menggambarkan makna kemiskinan secara menyeluruh. Definisi tersebut memiliki beberapa kelemahan, yakni; *pertama*, definisi tersebut sering tidak sesuai dengan definisi kemiskinan yang dimaksud oleh orang miskin itu sendiri dan tidak cukup untuk memahami realitas kehidupan mereka yang muram; *kedua*, definisi tersebut dapat menjerumuskan pada kesimpulan yang salah bahwa penanggulangan kemiskinan cukup hanya menyediakan makanan yang cukup bagi mereka yang miskin; *ketiga*, definisi tersebut telah terbukti tidak bermanfaat bagi pengambilan keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontra produktif (What is poverty and What are its Causes. <http://www.semeru.or.id/newslet/> [2005. Juni 12]). Kenyataan ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi dasar, namun juga terkait dengan berbagai dimensi lain dalam kehidupan manusia, seperti: pendidikan, kesehatan, jaminan masa depan dan peran sosial.

Dalam hal ini Nabi SAW pernah menjelaskan perihal kemiskinan ini dalam hadits riwayat Muslim (1986. I, hlm. 207) dari Abu Hurairah bahwa :

Yang dinamakan orang miskin bukanlah orang yang berkeliling memintaminta, kepada orang banyak, lalu peminta-minta itu diberi orang sesuap dua suap atau sebutir dua butir kurma. Tanya para sahabat; kalau begitu siapakah yang dinamakan miskin itu ya Rasulullah ? jawab beliau; orang miskin sesungguhnya adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutup kebutuhannya, namun keadaan itu tidak diketahui orang supaya bersedekah kepadanya dan tidak pula dia meminta-minta kesana sini.

Menurut Qardawi (2004, hlm, 511) hadits tersebut bukalai uraian linguistik mengenai arti kata miskin, arti ini semakna demngan pernyataan yang dikatakan kuat itu bukan karena kuat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat menahan amarahnya. Dalam hadits tersebut Rasulullah saw menghilangkan sebutan miskin dari orang yang meminta-minta, karena dengan meminta-minta berarti mereka telah berkecukupan atau bahkan berlebihan. Makna miskin yang sesungguhnya adalah orang yang berada dalam garis kebutuhan dan kemiskinan, namun ia tetap tidak meminta-minta, mereka inilah yang harus diberi bantuan.

Berdasarkan pendekatan ekonomi, penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang tingkat pendapatannya masih berada di bawah kebutuhan minimum. Jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kebutuhan minimum inilah yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan. Dalam hal ini Tjiptoherijanto (1997, hlm. 110) menjelaskan bahwa pengertian kemiskinan melalui pendekatan pendapatan ini tidak dapat mengakomodasikan penyediaan berbagai fasilitas sosial yang dimungkinkan disediakan oleh pemerintah, misalnya pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, jalan dan sebagainya. Sedangkan berbagai fasilitas tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar untuk memperbaiki tingkat kehidupan penduduk miskin, khususnya untuk membuka akses terhadap peluang yang mungkin dapat dipakai guna mengentaskan diri dari kemiskinan.

Untuk itu kemsikinan hendaknya dapat didefinisikan secara lebih luas maknanya dari sekedar miskin pendapatan saja. Dalam hal ini, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang mencakup material maupun non material (Reitsma dan Kleinpenning dalam Tjiptoherijanto. 1997, hlm. 70). Definisi tersebut tampak bersifat relatif karena intensistas standar kemiskinan tidak ditentukan. Lebih lanjut Tjiptoherijanto (1997, hlm. 110) menjelaskan bahwa ada dua

ukuran yang bisa digunakan dalam menganalisa tingkat kemiskinan, yaitu; *pertama*, kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melampaui ukuran kemiskinan yang telah ditetapkan. *Kedua*, kemiskinan relatif yaitu; kemiskinan yang berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupan. (BPS, 2006). Selanjutnya BPS menguraikan mengenai kategori kemiskinan yaitu : penduduk sangat miskin, penduduk miskin dan penduduk mendekati kemiskinan. *Pertama*, penduduk sangat miskin adalah apabila kemampuan untuk memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 kalori per orang perhari plus kebutuhan dasar non-makanan, atau setara dengan Rp. 120.000 per orang per bulan. *Kedua*, penduduk miskin adalah apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai 1900 sampai 2100 kalori per orang per hari plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara dengan Rp. 150.000 per orang per bulan. *Ketiga*, penduduk mendekati kemiskinan adalah apabila kemampuan memenuhi konsumsi makanan hanya mencapai antara 2100 sampai 2300 kalori plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara Rp. 175.000 per orang per bulan.

Sedangkan dalam teori Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang membagi tahapan-tahapan keluarga sejahtera yaitu: *pertama*, keluarga pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*Basic Need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. *Kedua*, keluarga sejahtera I yaitu keluarga tersebut sudah dapat memenuhi

kebutuhan yang sangat mendasar (*Basic Need*) tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (BKKBN, 2006).

Pendefinisian kemiskinan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap penentuan arah dalam penetapan kebijakan dan sekaligus memberikan standar evaluasi keberhasilan kebijaksanaan pengentasan kemiskinan. Walaupun konsep yang berkembang dewasa ini lebih berorientasi kepada pengertian ekonomi, namun masalah kemiskinan ini nampaknya harus dipahami lebih luas dari pada sekedar masalah ekonomi saja. Walaupun demikian, manifestasi kemiskinan yang paling mendasar adalah kemiskinan dari segi ekonomi, sebab kalau dari segi ekonomi saja sudah miskin maka bisa diduga bahwa individu tersebut juga miskin dari segi yang lain. Oleh sebab itu menurut Agus Sutanto (1993, hlm. 30) kemiskinan ekonomi adalah yang pertama kali harus di atasi. Pendekatan ekonomi sangat penting dalam mengkaji berbagai masalah kemiskinan ini, namun belum cukup tuntas untuk menjelaskan permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena sikap apatis, pasrah diri dan ketidak berdayaan yang mengungkung kehidupan penduduk miskin telah menimbulkan suatu lingkaran kebudayaan kemiskinan yang sukar ditembus.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun kemiskinan ini dapat diartikan secara luas maknanya, yakni tidak hanya dari segi materi saja namun juga meliputi segi non-materi, untuk itu dalam konsep ini kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang atau suatu keluarga baik dari segi materi maupun non-materi, namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebutuhan hidup manusia itu sendiri yang dapat dijadikan standar dalam menentukan miskin atau tidaknya seseorang atau keluarga di zaman ini. Di masa sekarang di mana telah terjadi perubahan yang menyeluruh baik di bidang social, ekonomi,

politik dan budaya sebagai akibat kemajuan ilmu dan teknologi, tentunya kebutuhan hidup manusia juga mengalami perubahan yang signifikan sehingga diperlukan penyesuaian tentang konsep kebutuhan hidup manusia saat ini. Dalam hal ini Masdar (1993, hlm. 127) berpendapat bahwa kebutuhan pokok manusia saat ini adalah ;

1. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
2. Sandang yang dapat menutup aurat dan dapat melindungi dari gangguan cuaca.
3. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan secara layak.
4. Kesehatan yang dapat memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita.
5. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan dapat mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia; kognitif, afektif dan psikomotorik.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Jamaluddin Kasum pernah mengingatkan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60 persen penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-29 persen hidup dalam kemiskinan absolut. Kemiskinan tersebut berada dalam posisi yang rentan, baik dari sisi pendapatan maupun sosial, termasuk tidak adanya akses kesehatan, pendidikan dan adanya ancaman kekurangan gizi. Definisi yang digunakan oleh Kassum dalam pendapat tersebut adalah definisi yang dibuat berdasarkan standar Internasional, yakni mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan 2 dolar per hari (setara Rp.20,000,- dengan kurs Rp.10,000,- per dolar AS (Kompas. Kliping kemiskinan. <http://www.urbanpoor.or.id/> [2005, Juni 12]).

Sementara itu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada akhir tahun 2005, ditetapkan bahwa garis kemiskinan penduduk perkotaan sebesar Rp.96.959/kapita/bulan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp.72.780/kapita/bulan.

Dengan ketentuan bahwa perhitungan tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori/kapita/hari, ditambah kebutuhan lain yakni sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi (Memahami Kemiskinan.

<http://www.pu.go.id/publik/> [2005. Juni 12].

Bila diperhatikan kedua batas kemiskinan di atas, maka tampak secara jelas bahwa batas kemiskinan yang diberikan BPS di atas sangat rendah bila dibandingkan dengan batas kemiskinan yang digariskan secara internasional yang mencapai angka 2 dolar per hari/orang. Batas kemiskinan yang ditetapkan BPS tahun 2005 yang menetapkan Rp. 96.959/kapita/bulan untuk penduduk perkotaan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp. 72.780/kapita/bulan, nampaknya perlu ditinjau kembali mengingat semakin meningkatnya harga sembilan kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi dan lain-lain pada saat ini.

Demikian juga dengan penetapan garis kemiskinan sebesar 175,000,-/orang/bulan yang digunakan pemerintah untuk menentukan penduduk miskin yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan BBM Oktober 2005 seperti dikatakan Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan Bambang Widianto, nampaknya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi penduduk miskin (Pertumbuhan Mulai Melambat. <http://jawapos.co.id/> [2005. November 29]). Batas kemiskinan tersebut dirasakan sangat rendah, karena pendapatan di atas Rp. 175,000,-/orang/bulan pun yang dianggap berpenghasilan menengah oleh pemerintah masih dirasakan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi, apalagi setelah kenaikan BBM oktober 2005 yang berimplikasi naiknya seluruh harga tentunya golongan yang dianggap pemerintah

menengah ini akan masuk pada kriteria penduduk miskin. Jadi batas kemiskinan yang ditetapkan pemerintah tersebut adalah batas kemiskinan yang terendah, karena penduduk berpendapatan di atas Rp. 175,000,-/orang/bulan pun pada dasarnya masih tergolong miskin.

Kalngan pemerhati masalah kemiskinan mencoba memilah kemiskinan yang melanda masyarakat saat ini menjadi beberapa benetuk. *Pertama*, kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi dimana pendapat individu atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan atau pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum; *kedua*, kemiskinan rerlatif yaitu posisi dimana pendapatan individu atau keluarga berada diantara garis kemiskinan, namun pendapatannya relatif masih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya; *ketiga*, kemiskinan structural yaitu suatu kondisi kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang menyebabkan ketimpangan pendapatan; dan *keempat*, kemiskinan cultural yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, seperti malas bekerja keras, tidak memiliki budaya menabung, pemboros dan tidak kreatif meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya (Jamasy. 2004, hlm. 30-31).

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya identik dengan kebutuhan konsumsi saja namun juga kemiskinan tersebut menyangkut beberapa bidang antara lain kesehatan, pendapatan, dan status sosial atau jaminan masa depan.

## 2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Memperhatikan akar kata miskin yang telah disebut di atas sebagai arti kata *diam* atau *tidak bergerak* diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap diam diri,

enggan atau tidak dapat berusaha. Menurut Quraish Shihab (1996, hlm. 449) keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan juga dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamakan *dabbah*, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak. Seperti yang dijelaskan dalam QS H<sup>u</sup>d yang artinya “*Tidak ada satu dabbah pun di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya*” (QS H<sup>u</sup>d, [11]. 6). Ayat ini menjamin siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan diam nenanti. Dengan demikian maka dapat dimengerti bahwa kemiskinan yang tergolong dari kemiskinan kultur yang merupakan budaya dari sifat malas seseorang tidak dikehendaki oleh Allah swt. Pandangan ini terlihat lebih jelas lagi dalam QS Ibrahim yang artinya “*Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi sangat kufur* (QS Ibrahim, [14]. 34). Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa sumber daya alam yang disiapkan Allah untuk manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas. Tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut.

Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, atau mengganti dengan alternatif penggantinya yang diistilahkan oleh ayat tersebut dengan sikap aniaya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah sangat murka terhadap hambanya yang tidak memanfaatkan nikmat yang telah diberikan. Disamping itu Shihab menjelaskan bahwa ada factor lain yang menyebabkan

terjadinya kemiskinan yaitu faktor penganiayaan terhadap orang lain atau diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural erat kaitannya dengan masalah ketidakadilan sosial.

Masalah ketidakadilan sosial merupakan salah satu faktor penyebab dan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Ketidakadilan sosial berasal dari dua suku kata yakni; kata tidak dan adil yang mendapatkan imbuhan ke-an, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991, hlm. 7) kata adil memiliki beberapa arti yakni tidak berat sebelah atau tidak memihak; berpihak kepada yang benar dan sepatutnya; atau tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata keadilan menunjukkan arti perbuatan atau perilaku yang adil. Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa keadilan adalah kerjasama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organik, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan asli (Sudarsono, 1992, hlm. 17). Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kata tidak adil bermakna kebalikan dari kata adil, yakni terjadinya pemihakan kepada sebagian orang, tidak berpihaknya kepada kebenaran atau terjadinya kesewenang-wenangan. Jadi ketidakadilan sosial bermakna suatu keadaan dimana tidak terpenuhinya hak sebagian kelompok atau orang, atau terjadinya kesewenang-wenangan pada suatu kelompok atau tidak berpihaknya kepada kebenaran yang menyebabkan tidak dimilikinya kesempatan dan fasilitas yang sama bagi kelompok tertentu untuk hidup yang layak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidup yang layak merupakan jaminan bagi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera, sehingga dapat meningkatkan pendidikan, gizi, kinerja dalam berkerja dan berusaha sehingga meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Tjiptoherjanto (1997, hlm. 78) bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini setidaknya-tidaknya ada dua masalah utama dalam

pengembangan SDM yakni; *pertama*, masih belum berkembangnya (*Under Development*) SDM, yang terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya konsumsi gizi dan belum memadainya penyediaan fasilitas-fasilitas kehidupan yang layak. Hal ini berakibat pada rendahnya kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kedua, masih belum dimanfaatkannya seluruh keterampilan dan kemampuan SDM yang ada secara optimal, sehingga tidak mengherankan jika saat ini masih terdapat *under utilization* SDM di Indonesia yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi *under development* yang terdapat dalam SDM tersebut. *Kedua* faktor tersebut juga mengakibatkan pada rendahnya daya kemampuan SDM untuk memiliki faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan modal, sehingga semakin mendorong mereka ke dalam lembah kemiskinan.

Menurut Didin Suudin (2002, hlm. 155) bahwa penyebab kemiskinan paling tidak berasal dari dua hal atau bahkan kedua-duanya. *Pertama*, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultur) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kemiskinan struktural yakni kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman. Harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan sendiri. Menurut Didin, kemiskinan struktural inilah yang paling menonjol di banyak tempat dan negara.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Masdar F Masudi (2003, hlm. 210) yang berpendapat bahwa ketimpangan sosial yang terjadi saat ini disebabkan oleh faktor struktural. Masdar berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan karena keserakahan, namun semua orang memejamkan mata terhadap keserakahan ini dan tidak pernah sadar bahwa kelaparan yang terjadi dimana-mana saat ini tidak lain disebabkan karena dimanjakannya keserakahan. Inilah salah satu sebab mengapa berbagai teori dan

ideologi kesejahteraan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, justru berakhir dengan semakin parah dan meratanya kemiskinan.

Dalam hal ini, setidaknya-tidaknya ada tiga pandangan tentang kemiskinan yakni; pertama, kaum konservatif memandang kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri. Dalam pandangan mereka, orang menjadi miskin karena malas bekerja, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalitas, tidak ada hasrat berprestasi dan sebagainya; kedua, kaum liberal berpandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, menurut mereka budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit; dan ketiga, kaum radikal menekankan pada struktur ekonomi, politik dan sosial. Dalam pandangan mereka kemiskinan memang dilestarikan untuk selalalu miskin, karena kemiskinan mempunyai fungsi yang menunjang dominan, *rulling elites* dan kelompok kapitalis. Berbeda dengan kaum konservatif dan liberal, kaum radikal memandang manusia sebagai makhluk sosial yang kooperatif, produktif dan kreatif. Bila mereka melakukan perbuatan yang sebaliknya, itu disebabkan karena kondisi ekonomi dan politik memaksanya (Jalaluddin Rahmat, hlm. 24).

Lebih lanjut Rahmat menguraikan bahwa bahwa kemiskinan itu bersifat fungsional, artinya tidak selamanya kemiskinan tersebut tidak bermanfaat, ada juga fungsi-fungsi kaum miskin atau jasa-jasa orang miskin tersebut diantaranya adalah; *pertama*, kemiskinan menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan kotor, tidak terhormat, berat, berbahaya, tetapi dapat dibayar dengan harga yang sangat murah. *Kedua*, kemiskinan menambah atau memperpanjang nilai guna barang atau jasa, seperti baju bekas yang sudah tidak terpakai lagi dapat dijual atau diinfakkan kepada orang miskin. *Ketiga*, kemiskinan

mensubsidi berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi orang kaya. Pegawai-pegawai kecil, buruh-buruh rendah yang rela dibayar murah tentunya akan mengurangi biaya produksi yang berakibat pada berlipatgandanya penghasilan orang kaya. *Keempat*, kemiskinan menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya orang miskin maka lahirlah pekerjaan tukang kredit, perjudian (yang terorganisir seperti togel), aktivis-aktivis LSM (menyalurkan dana bantuan dari badan-badan internasional) dan termasuk dibentuknya departemen sosial. *Kelima*, kemiskinan memperteguh status sosial orang-orang kaya. *Keenam*, kemiskinan bermanfaat untuk dijadikan sebagai tumbal pembangunan. Pendapat Rahmat tersebut senada dengan sabda Rasulullah saw “*Kalian diberi rizeki dan ditolong oleh orang-orang kecil diantara kalian*”. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw mengingatkan bahwa kapan saja kita menikmati fasilitas, keluasaan, kesenangan dan kenikmatan, maka kita harus mengingat orang miskin.

Sementara itu Adi Sasono (1999, hlm. 38) mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan karena sejak semula mereka tidak mempunyai faktor-faktor kultur yang dinamis. Mereka menjadi miskin karena kesempatan itu telah dihancurkan dari mereka. Proses penghancuran kesempatan ini telah terjadi sejak zaman feodalisme kerajaan (Hindu dan Islam), zaman penjajahan Belanda, zaman Jepang dan zaman ketergantungan sekarang. Kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia disebabkan karena proses penghancuran kesempatan yang terjadi sebagai akibat eksploitasi, seperti pembayaran gaji yang tidak adil atas jasa tenaga kerja yang tidak sesuai dengan UMR.

Sedangkan Jamasy (2004, hlm. 36) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan saat ini merupakan gabungan dari kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi (misalnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap atau tidak memiliki modal usaha), faktor struktural

(misalnya terjadinya diskriminasi dalam pembangunan dan eksploitasi baik terhadap sumber daya alam maupun terhadap masyarakat), faktor sosial (misalnya pasif, kurang pergaulan, tidak mau bergaul atau bermasyarakat), dan faktor kultural (misalnya pemalas, gengsi, tidak kreatif, tidak mau bekerja keras dan lain-lain). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan karena berbagai faktor, yaitu faktor ekonomi, struktural, sosial, dan kultural.

Faktor struktural saat ini dianggap sebagai faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya kemiskinan baik kemiskinan absolut, kemiskinan relatif maupun kemiskinan cultural. Penyebab kemiskinan structural ini erat kaitannya dengan pengaruh kebijakan pemabangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat yang berakibat pada sempitnya lapangan kerja, upah kerja yang rendah, produktivitas kerja menurun, diskriminasi, tekanan harga dan lain-lain. Untuk memutuskan mata rantai kemiskinan ini tidak hanya cukup dengan penyelesaian salah satu faktor saja, melainkan berbagai faktor penyebab kemiskinan tersebut harus dicarikan jalan penyelesaiannya.

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa masalah kemiskinan bukanlah masalah yang hanya terbatas dari masalah-masalah ekonomi saja, namun masalah kemiskinan juga terkait dengan berbagai permasalahan lain, seperti structural, cultural, ekonomi dan sosial serta ekologis. Jadi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini tidak cukup jika hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Adi Sasono (1999, hlm. 42) bahwa masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang melekat pada kehidupan sejumlah rakyat menuntut perlunya pengembangan upaya-upaya yang dapat mempengaruhi prilaku pembentuk/struktur dan tata nilai kemasyarakatan. Persoalan ini tidak bisa ditangani hanya dengan fenomena ekonomi saja, dan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan

pemerintah dengan program pembangunannya, namun diperlukan gerakan kebudayaan atau gerakan perubahan kebudayaan.

### 3. Bahaya Kemiskinan

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandangan yang keliru tentang kemiskinan. Kalangan ahli tasawuf berpandangan bahwa kemiskinan sarana penyucian diri, pandangan ini bahkan masih dianut oleh sebagian masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan kata “fakir” sebagai orang yang sengaja membut dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin (Quraish Shihab, 1996, hal. 451). Sementara itu menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi (1996, hlm. 11) tidak ada satupun ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw yang memuji kemiskinan.

Lebih lanjut Qardawi menjelaskan bahwa hadits-hadits Rasulullah saw yang memuji terhadap sikap zuhud dalam menempuh hidup duniawi ini sama sekali tidak menyinggung tentang terpujinya kemiskinan. Adapun sikap zuhud dapat menumbuhkan rasa puas dalam menerima sesuatu. Orang dikatakan zuhud adalah arti yang sebenarnya adalah orang yang berharta dan sanggup menjadikan hartanya itu di bawah kekuasaannya, bukan ia yang dikuasai atau diperhamba oleh hartanya.

Dengan demikian Islam menilai kekayaan itu satu nikmat sebagai karunia Allah swt yang harus disyukuri. Kemiskinan itu suatu cobaan, suatu bencana yang hanya dengan pertolongan Allah dapat dihindari. Dalam konteks penjelasan al-Qur’an tentang kemiskinan ditemukan ayat-ayat yang memuji kecukupan, bahkan al-Qur’an menganjurkan untuk memperoleh kelebihan, seperti yang diungkapkan dalam QS Al- Jum’ah “*Apabila telah selesai shalat (Jum’at) maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadhil (kelebihan) dari*

*Allah*” (QS Al- Jum’ah, [62]:10). Sejak dini pula al-Qur’an mengingatkan kepada Rasulullah saw tentang besarnya anugerah Allah kepada beliau, yang antara lain menjadikannya berkecukupan (kaya) setelah sebelumnya miskin, seperti terdapat dalam QS Al-Dhuha “ Bukankah Allah telah mendapatimu miskin kemudian Dia menganugerahkan kepadamu kecukupan? (QS Al-Dhuha [93] :8).

Dengan demikian dalam al-Qur’an maupun dalam hadits-hadits Rasulullah menilai bahwa kemiskinan adalah suatu hal yang sangat berbahaya terhadap individu dan masyarakat, akidah dan kepercayaan, pikiran dan kebudayaan, demikian pula terhadap keluarga dan seluruh bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qardawi (1996, hlm. 13) tentang bahaya kemiskinan antara lain; *pertama*, bahaya kemiskinan terhadap akidah. Kemiskinan merupakan bahaya besar terhadap kepercayaan agama, khususnya kemiskinan yang sangat parah, yang berada dihadapan mata orang-orang kaya yang egois dan yang menghawatirkan lagi kalau orang-orang miskin itu tidak menentu pencahariannya, sedangkan pihak orang-orang kaya sama sekali tidak mau mengulurkan bantuannya. Di saat itulah, kemiskinan akan mengundang keraguan terhadap Sunatulla di atas dunia ini, serta dapat menimbulkan kepercayaan terhadap adanya ketidakadilan dalam pembagian rezeki. *Kedua*, bahaya kemiskinan terhadap etika dan moral. Bila kemiskinan merupakan bahaya bagi agama dalam segi akidah dan kepercayaan, maka tidak sedikit pula bahayanya terhadap segi etika dan moral. Kekecewaan dan keputusan orang miskin, lebih-lebih yang hidup di tengah-tengah orang-orang kaya, banyak mendorong mereka untuk berbuat dan bertindak yang tidak bisa dibenarkan oleh moral agama. *Ketiga*, bahaya kemiskinan terhadap pikiran manusia. Seseorang yang tidak sanggup menutupi kebutuhan hidupnya, keluarganya dan anak-anaknya membuat pikirannya tidak cermat dan tidak bisa lagi berpikir jernih. *Keempat*, bahaya kemiskinan terhadap rumah tangga. Kemiskinan dapat

mengancam kehidupan keluarga dan rumah tangga dalam beberapa segi yaitu; segi pembinaannya, segi kelangsungannya dan segi pemeliharannya. *Kelima*, bahaya kemiskinan terhadap masyarakat dan ketentramannya. Kemiskinan merupakan bahaya vital terhadap keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan kebutuhan yang terus mendesak dan konsumsi yang tidak terpenuhi, untuk mencapainya tidak jarang diantara mereka merampas hak-hak orang lain. *Keenam*, bahaya kemiskinan terhadap kelangsungan hidup. Bahaya kemiskinan semacam ini sangat merusak sumber daya manusia, misalnya kesehatan terganggu (Kurang Gizi), pendidikan yang tidak layak.

Dengan demikian sangat jelas bahwa bahaya yang ditimbulkan dari kemiskinan yang pada umumnya mempengaruhi segala sektor kehidupan manusia, dan merupakan hambatan terhadap pembangunan manusia seutuhnya.

### **Pengamalan Agama**

Dalam mengetengahkan masalah pengamalan agama ini, maka akan dilihat juga perilaku keagamaan masyarakat. Konsep yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah konsep agama. Dalam penelitian ini agama dilihat sebagai bagian dari kehidupan dan sosio kultural, terlepas dari kekeramatan dan kesucian yang terkait padanya, maka sebagai sasaran studi, agama harus dikembalikan kepada situasi dan yang menghayatinya, meyakinkannya dan mendapatkan pengaruh daripadanya yaitu manusia sebagai bagian dari masyarakat. Pengamalan agama merupakan bagian integral dalam suatu kehidupan masyarakat, karena masyarakat memiliki atau mempercayai agama maka untuk mewujudkan kepercayaan tersebut, masyarakat memiliki kegiatan atau aktivitas dalam mengamalkan agamanya tersebut. Hal tersebut merupakan keyakinan dalam beragama.

Keyakinan beragama merupakan bagian dari kehidupan yang paling dalam (Mc. Guire, 1989, hlm. 132). Berdasarkan keyakinan tersebut, menurut Elizabeth K. Nottingham, dalam menghadapi hidup, agama merupakan faktor yang dapat memberi ketentraman. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa “agama dianggap sebagai salah satu cara yang paling penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang penuh ketegangan (Elizabeth K. Nottingham, 1985, hlm. 75)

Dalam kaitan dengan kehidupan sosial, fungsi agama ternyata sungguh besar. Elizabeth menyebutkan dua fungsi pokok yaitu ; 1) membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat-sifat dan kewajiban sosial yaitu dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi menyalurkan sikap-sikap para penganutnya, serta menetapkan kewajiban-kewajiban sosial mereka, 2) agama memainkan peran vital dalam memberikan kekuatan memaksa yang mendukung dan memperkuat adat istiadat.

Dalam kaitan ini terlihat fungsi dan peran agama dalam kehidupan para penganutnya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosial mereka. Dalam kondisi yang serba tidak menentu, keyakinan agama dinilai sebagai faktor dominan dalam mendorong seseorang atau kelompok mengambil suatu keputusan bagi masa depannya. Selanjutnya berdasarkan keyakinan tersebut, seseorang akan merasa tentram bila pertimbangan yang diambilnya didasarkan atas ajaran agama yang diyakininya. Berarti agama berfungsi sebagai pandangan hidup untuk menjelakan keberadaan manusia di dunia, dimana ia berasal dan kemana ia akan pergi setelah meninggal, dan agamalah satu-satunya yang mampu memberi arah tujuan hidup manusia (Saifudin, 1986, hlm. 5).

Karena itu agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Berarti agama juga terkait erat

dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Agama juga dapat dilihat secara operasional yang empirik dalam bentuk adat istiadat yang mengatur hidup masyarakat, karena agama Islam di Indonesia ini telah bercampur dengan adat istiadat setempat atau dalam istilah Geertz adalah Islam sinkretis.

Sementara itu pengamalan agama serta perilaku agama dalam masyarakat berbeda-beda, ada pengamalan agamanya tinggi, adapula yang sedang dan adapula yang rendah atau mungkin tidak mempunyai pengamalan sama sekali. Menurut Abdul Aziz Saleh (1995, hal. 4) bahwa “ pengamalan agama dapat dilihat dari perilakunya. Dalam konsep ilmu sosial perilaku terdiri dari pola pikir, sikap, tindakan dan gaya hidup (*life style*). Sejalan dengan pendapat tersebut, untuk melihat pengamalan agama dalam masyarakat ini harus pula dipelajari pola pikir, sikap, tindakan dan gaya hidup (*life style*) kelompok masyarakat.

Lebih lanjut Saleh menjelaskan pola pikir yang ada pada masyarakat ini berarti kerangka pemahaman yang menyatu dalam dirinya dan terbukti dalam sikap dan tindakan masyarakat tersebut. Dengan demikian menjadi unsur yang paling penting dalam pola pikir adalah cara pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sikap agama merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran ataupun norma agama. Sikap agama ini terbentuk karena adanya konsistensi kepercayaan mereka. Selain itu dari sikap agama ini akan memunculkan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama, sehingga gaya hidupnya sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya.

### **Perilaku Menyimpang**

#### **1. Pengertian Perilaku Menyimpang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991, hlm. 547) dijumpai pengertian perilaku antara lain sikap seseorang; tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang. Menurut J.P Chafin,

dalam Dictionay of Psikologi ( 1995, hlm 21) menjelaskan bahwa prilaku merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban yang dilakukan oleh organisme. Prilaku juga berarti suatu gerak atau kompleks gerak-gerak dan secara khusus tingkah laku, dan juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktivitas.

Sedangkan menurut Saparinah Sadli (1977, hlm. 35) prilaku adalah tingkah laku dari pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Sementara itu LL. Ther Stone yang dikutip oleh Abu Ahmadi (1991, hlm. 163) menjelaskan prilaku adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif ataupun negatif, prilaku juga diartikan sebagai posisi keadaan mudah terpengaruh terhadap seseorang, ide atau objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif dan behavior.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prilaku adalah kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif maupun negatif terhadap objek atau situasi. Dalam segi positif adalah keadaan mental ataupun kesiapan yang diatur melalui pengamalan yang memberikan pengaruh dinamik/terarah terhadap respon individu pada semua objek atau situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan bentuk negatif adalah prilaku yang menyimpang hanya dapat dimengerti sebagai suatu yang selalu berubah-ubah dan merupakan refleksi dari proses-proses interaksi yang kompleks. Dalam prilaku semacam ini biasanya cenderung berbuat melanggar norma-norma ataupun hukum formal. Sedangkan penyimpangan menurut Kartini-Kartono (2001, hlm. 1) adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, moral, disiplin serta hukum formal. Sedangkan Simandjuntak (1975, hlm. 12) menjelaskan penyimpangan sebagai suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok ataupun masyarakat.

Dengan demikian perilaku menyimpang mengandung makna yaitu perbuatan, tindakan, tingkahlaku seseorang yang cenderung mengarah pada hal yang negatif. Menurut Abdulsyani (1978, hlm. 21) perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak mengindahkan norma-norma agama maupun norma formal. Dengan demikian maka benarliah bahwa perilaku menyimpang merupakan bentuk dari perilaku yang negatif.

Dalam studi masalah sosial, perilaku menyimpang merupakan masalah sosial yang terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja, diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada. Sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan ia tahu apa yang dilakukan melanggar aturan. Becker (dalam Soerjono Soekanto, 1988, hlm. 26), mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang menyimpang mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk menyimpang.

Masalah sosial perilaku menyimpang bisa ditelusuri melalui pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual melalui pandangan sosialisasi. Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan masyarakat (Kauffman, 1989, hlm. 6) mengemukakan bahwa perilaku menyimpang juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan menghindari perilaku-prilaku yang negatif.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas di daerah pedesaan, bahwa beberapa tempat di desa mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu, misalnya Eitzen (1986, hlm. 400), mengatakan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat desa pada umumnya berada pada bagian wilayah pedesaan yang miskin, dampak kondisi perumahan di bawah standar, *overcrowding*, derajat kesehatan rendah dari kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil. Lebih lanjut Eitzen beranggapan bahwa seorang belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi. Apabila lingkungan interaksi cenderung devian, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai devian yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk menumbuhkan tindakan kriminal.

Mengenai pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Dikatakan oleh Eitzen (1986, hlm. 410) bahwa seorang dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku menyimpang karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar.

Menurut Singgih D. Gumarso (1988, hlm. 19), mengatakan dari segi hukum perilaku menyimpang dapat digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu : (1) perilaku yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; (2) perilaku yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku.

Tentang normal atau tidaknya perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim dalam bukunya “ *Rules of Sociological Method* Bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja (Soerjono Soekanto, 1985, hlm. 73). Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal/jahat yaitu perilaku yang disengaja dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

## 2. Timbulnya Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang atau social disorder merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang jika dikaji menuntut adanya pemikiran yang kompherensif mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Prilaku menyimpang terdapat dua bagian yaitu prilaku yang tidak disengaja dan prilaku yang disengaja baik berupa tindakan yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Pada umumnya faktor tersebut tidak jauh berbeda dengan masalah lainnya, masalah tersebut merupakan bagian yang mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satu faktor tersebut antara lain: *pertama*, mengenai keadilan. Makna keadilan disini mengandung arti bahwa persamaan atau tindakan yang tidak berat sebelah (Shihab, 1996, hlm. 113). Shihab menganjurkan mengenai prilaku adil terhadap sesama manusia, seperti ungkapan dalam QS Al-Hadid “ *Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti nyata dan*

*Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakannya”* (QS Al-Hadid, [57] :25). Shihab mengaitkan keadilan dengan kemiskinan, menurutnya kemiskinan yang terjadi karena ketiadilan dapat menjerumuskan orang pada perbuatan yang melanggar hukum, seperti do’a Rasulullah saw yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim “ *Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekufuran dan kehinaan, dan aku berlindung pula dari menganiaya dan dianiaya”*. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa kemiskianan dapat menyebabkan kekufuran, kufur disini diartikan dengan pelanggaran hukum atau norma agama. *Kedua*, rendahnya pengamalan agama. Rendahnya pengamalan agama merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Masngudin (2002, hlm. 2) rendahnya pengamalan agama ataupun sikap agama merupakan faktor utama terjadinya tindak kejahatan di Indonesia, menurutnya rendahnya pengamalan tersebut menyebabkan tidak adanya kontrol dalam diri mereka sehingga mereka sangat mudah melakukan tindakan-tindakan di luar norma-norma agama.

Adapun sikap agama menurutnya suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong sisi orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama. Sikap keagamaan terbentuk karena adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai komponen kognatif perasaan terhadap agama dan sebagai komponen efektif perilaku terhadap agama. Agama sebagai komponen kognatif dan efektif saling berintegrasi sesama secara kompleks. Pembentukan sikap keagamaan ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan agama. *Ketiga*, Lingkungan di dalam masyarakat, termasuk juga faktor pergaulan. Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak dan bentuknya akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepribadian dan tingkah laku. Perubahan-perubahan masyarakat yang berlangsung secara cepat dan

ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang menegangkan seperti persaingan ekonomi, pengangguran, keanekaraman mass-media, pergaulan bebas memungkinkan akan memicu perilaku-prilaku yang melanggar norma-norma agama.

## Bab 5

### PENUTUP

#### Simpulan

Di akhir pembahasan ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan yaitu :

Masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk strata ekonomi yaitu petani pemilik lahan, petani penyewa tanah, dan buruh upahan. Masing-masing kelompok mempunyai strata ekonomi yang berbeda yaitu kelompok petani pemilik lahan mempunyai strata ekonomi yang lebih baik dibanding kelompok petani lainnya. Kelompok petani penyewa menempati urutan kedua dengan kategori miskin dan kelompok ketiga petani buruh upahan dengan kategori sangat miskin. Dalam teori Badan Pusat Statistik (BPS) bila kepala keluarga mempunyai penghasilan bersih minimal Rp. 175,000/bulan maka dikelompokkan mendekati kemiskinan. Sedangkan dibawah penghasilan tersebut dapat kategori miskin dan sangat miskin. Dengan demikian berarti petani penyewa dapat di golongkan miskin, dan petani upahan dapat di golongkan sangat miskin.

Sedangkan pengamalan agama masyarakat di daerah ini sangat rendah karena, pertama pendidikan masyarakat yang kurang. Pada umumnya pendidikan masyarakat daerah ini sangat rendah, sehingga pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan agamanya menjadi kurang. Walaupun demikian ada juga diantara masyarakat yang mengikuti pendidikan keagamaan secara informal seperti lewat cawisan, namun hal ini tidak begitu menggembirakan, tetap saja pengamalan agamanya kurang. Kedua, sikap agama. Kurangnya semangat (*ghiroh*) dari setiap individu dalam masyarakat untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama, dengan alasan tidak ada waktu untuk

mengerjakannya karena sibuk bekerja. Ketiga, ekonomi. Dengan strata ekonomi yang rendah menyebabkan motivasi untuk menjalankan ibadah atau ajaran agama sangat kurang. Karena itu wajar bila terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama maupun norma formal.

Adapun bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat Kecamatan Pemulutan Selatan antara lain; perjudian (togel, Rambo, dadu kuncang, dan sabung ayam), minuman keras (alkoholis), pencurian dan perampokan (kriminal berat). Perjudian menempati urutan pertama dalam perilaku menyimpang yang ada, karena perjudian tersebut telah merambah pada anak-anak usia sekolah, namun kasus seperti ini tidak sampai pada aparat polisi karena tidak ada pengaduan. Sedangkan minuman keras banyak di konsumsi oleh para remaja, malah aparat desapun kadang-kadang ikut dalam pesta minuman keras ini, namun sama halnya dengan perjudian kasus ini tidak sampai pada pihak polisi. Selanjutnya pencurian marak di daerah ini terutama pelaku pencurian kebanyakan dari motifnya adalah masalah ekonomi. Selanjutnya perampokan kebanyakan bermotifkan ekonomi. Karena pelaku perampokan yang ada di daerah ini termasuk *professional criminal* yaitu merampok merupakan pencaharian mereka.

### **Implikasi**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan bahwa masyarakat Kecamatan Pemulutan Selatan merupakan masyarakat miskin, pengamalan keagamaan yang tidak memadai dalam arti kurang sehingga hal ini mempermudah timbulnya perilaku menyimpang di daerah ini.

### **Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari selesainya penelitian ini adalah :

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memperhatikan strata ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemulutan Selatan, supaya diadakan pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan dan juga dapat membuat saluran

irigasi teknis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pemulutan Selatan.

2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat meminimalisir perilaku-prilaku menyimpang yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan Kab Ogan Ilir, terutama yang menyangkut keresahan masyarakat misalnya perjudian yang merambah pada anak-anak usia sekolah.
3. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan penyuluhan agama atau mengirim sarjana-sarjana penggerak pedesaan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman keagamaan pada masyarakat.
4. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memajukan pembangunan di Kecamatan Pemulutan Selatan terutama masalah penerangan (PLN) dan membuka daerah-daerah yang terisolir dengan pembangunan jalan supaya transportasi lebih mudah dan dapat dijangkau.

### **Rekomendasi**

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk melihat keadaan yang terjadi di daerah Kecamatan Pemulutan Selatan yang mendapat predikat daerah termiskin se Kabupaten Ogan Ilir, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti atau perlu penelitian selanjutnya yang menyeluruh sehingga berguna untuk pengambilan keputusan menentukan kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Karena itu penulis menganjurkan agar dilakukan penelitian selanjutnya.